



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN**  
**TENAGA KERJA**

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662  
Website : dpmptsp.balangankab.go.id email : dpmptsp.balangan@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR: 188.45/17 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI**  
**LADING ASAH BATU (LAYANAN PENDAMPINGAN PERIZINAN BERUSAHA**  
**TANPA BATAS WAKTU) PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah perlu menunjuk Pejabat Pengelola, Admin dan Inovator inovasi Lading asah batu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
  - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi Lading asah batu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 43 Nomor 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI LADING ASAH BATU PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
- KESATU :** Membentuk Pejabat Pelaksana Inovasi Lading asah batu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan.
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Menunjuk Aktor Inovasi Lading asah batu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan
- KEEMPAT :** Aktor Inovasi yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Menunjuk Admin Inovasi Lading asah batu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan
- KEENAM : Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 20 September 2021

Kepala DPM Kabupaten Balangan,



N. ABIL S. Pd, M.AP  
Pembina Utama Muda

NIP.19690813 199412 1 002



**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSPPTK KABUPATEN BALANGAN****NOMOR : 188.45/ 17 / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2021****TANGGAL : 20 September 2021****SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA INOVASI LADING ASAH BATU PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

| No. | Jabatan   | Jabatan Dalam Tim |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | Kepala DPMPTSPPTK   | Pembina           |
| 2.  | Sekretaris DPMPTSPPTK   | Pengarah          |
| 3.  | Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi & Pengendalian Pelaksanaan PM  | Anggota           |
| 4.  | Kabid Pelayanan Perizinan Berusaha & Non Berusaha                             | Anggota           |
| 5.  | Kabid Pengaduan, Data & Sistem Informasi Penanaman Modal                      | Anggota           |
| 6.  | JF Analis Kebijakan Ahli Muda   | Anggota           |
| 7.  | JF Analis Kebijakan Ahli Muda   | Anggota           |
| 8.  | JF Analis Kebijakan Ahli Muda   | Anggota           |
| 9.  | Kabid Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial | Anggota           |
| 10. | JF Pelatihan Kerja dan Kelembagaan  | Anggota           |
| 11. | JF Adminkes Dinas kesehatan   | Anggota           |
| 12. | Penyuluh Obat dan makanan   | Anggota           |
| 13. | JF Penguji Kendaraan Bermotor   | Anggota           |
| 14. | JF Analis Kebijakan Ahli Muda   | Anggota           |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 15. | JF Analis Kebijakan Ahli Muda                   | Anggota |
| 16. | JF Analis Kebijakan Ahli Muda                   | Anggota |
| 17. | Penyusun Kebutuhan Barang Investasi             | Anggota |
| 18. | Analis Budidaya Perikanan                       | Anggota |
| 19. | Pemandu Wisata                                  | Anggota |
| 20. | JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda       | Anggota |
| 21. | JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda       | Anggota |
| 22. | Analis Lingkungan Hidup                         | Anggota |
| 23. | Kepala Bidang Tata Ruang                        | Anggota |
| 24. | Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan     | Anggota |
| 25. | JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda | Anggota |
| 26. | JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda            | Anggota |
| 27. | JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda            | Anggota |
| 28. | JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda            | Anggota |
| 29. | JF Pengembangan Kewirausahaan Ahli Muda         | Anggota |
| 30. | JF Pengawas Koperasi Ahli Muda                  | Anggota |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 31. | Analisis Data Sertifikasi Industri Pangan | Anggota |
| 32. | Analisis Bahan dan Barang Teknik Logam    | Anggota |
| 33. | JF Perdagangan Ahli Muda                  | Anggota |
| 34. | Pengadministrasian Perizinan              | Anggota |
| 35. | JF Pranata Komputer Ahli Muda             | Anggota |
| 36. | Pengelola Sistem dan Jaringan             | Anggota |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN



ABDI Satrio M.AP  
Pemibua Utama Muda

NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN  
 NOMOR : 188.45/ <sup>13</sup> / DMPSTSP-PTTK-BLG/ TAHUN 2021  
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN AKTOR INOVASI LADING ASAH BATU PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

| No. | Jabatan  | Jabatan Dalam Tim |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan | Ketua             |
| 2.  | Sekretaris DPMPTSP-PTTK  | sekretaris        |
| 3.  | Kabid Pengaduan, Data & Sistem Informasi Penanaman Modal   | Anggota           |
| 4.  | JF Adminkes Dinas kesehatan  | Anggota           |
| 5.  | JF Penguji Kendaraan Bermotor  | Anggota           |
| 6.  | JF Analis Kebijakan Ahli Muda  | Anggota           |
| 7.  | JF Analis Kebijakan Ahli Muda  | Anggota           |
| 8.  | Wartawan BARITO POST   | Anggota           |
| 9.  | STKOM PARINGIN   | Anggota           |
| 10. | ITSM (institut teknologi sapta mandiri)  | Anggota           |
| 11. | Pelaku Usaha UMK   | Anggota           |
| 12. | Pelaku Usaha UMK   | Anggota           |
| 13. | Pelaku Usaha UMK   | Anggota           |
| 14. | Pelaku Usaha UMK   | Anggota           |
| 15. | Pelaku Usaha UMK   | Anggota           |
| 16. | Pelaku Usaha Non UMK   | Anggota           |
| 17. | Pelaku Usaha Non UMK   | Anggota           |
| 18. | Pelaku Usaha Non UMK   | Anggota           |
| 19. | Pelaku Usaha Non UMK   | Anggota           |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN BALANGAN



M. ABUL SANG M.AP  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19690813 199412 1 002



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSPPTK KABUPATEN BALANGAN  
 NOMOR : 188.45/ <sup>12</sup> / DMPSTSPPTK-BLG/ TAHUN 2021  
 TANGGAL : 20 September 2021

SUSUNAN JEJARING INOVASI LADING ASAH BATU PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

| No. | Jabatan   | Jabatan Dalam Tim |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | Kepala DPMPTSPPTK   | Pembina           |
| 2.  | Sekretaris DPMPTSPPTK   | Pengarah          |
| 3.  | Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi & Pengendalian Pelaksanaan PM  | Anggota           |
| 4.  | Kabid Pelayanan Perizinan Berusaha & Non Berusaha                             | Anggota           |
| 5.  | Kabid Pengaduan, Data & Sistem Informasi Penanaman Modal                      | Anggota           |
| 6.  | JF Analisis Kebijakan Ahli Muda   | Anggota           |
| 7.  | Kabid Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial | Anggota           |
| 8.  | JF Pelatihan Kerja dan Kelembagaan  | Anggota           |
| 9.  | JF Adminkes Dinas kesehatan   | Anggota           |
| 10. | Penyuluh Obat dan makanan   | Anggota           |
| 11. | JF Penguji Kendaraan Bermotor   | Anggota           |
| 12. | JF Analisis Kebijakan Ahli Muda   | Anggota           |
| 13. | JF Analisis Kebijakan Ahli Muda   | Anggota           |
| 14. | JF Analisis Kebijakan Ahli Muda   | Anggota           |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 15. | Penyusun Kebutuhan Barang Investasi             | Anggota |
| 16. | Analisis Budidaya Perikanan                     | Anggota |
| 17. | Pemandu Wisata                                  | Anggota |
| 18. | JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda       | Anggota |
| 19. | JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda       | Anggota |
| 20. | Analisis Lingkungan Hidup                       | Anggota |
| 21. | Kepala Bidang Tata Ruang                        | Anggota |
| 22. | Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan     | Anggota |
| 23. | JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda | Anggota |
| 24. | JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda            | Anggota |
| 25. | JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda            | Anggota |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TTK  
KABUPATEN LANGKAN



N. AHLI S.Pd, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP.19690813 199412 1 002